

BAB I

PENDAHULUAN

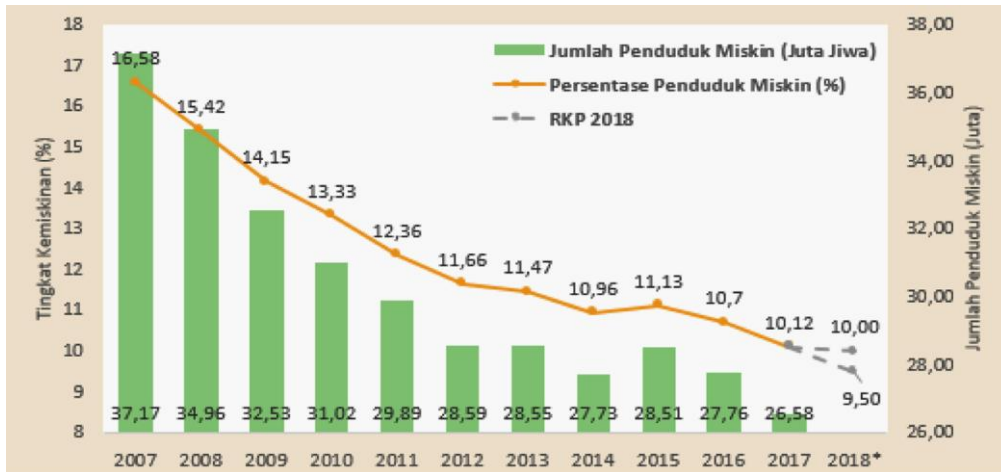
A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional salah satunya sebagaimana telah tertulis dalam Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Tolak ukur kesejahteraan umum dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, yang berarti jika kesejahteraan masyarakatnya meningkat maka tingkat kemiskinannya berkurang, begitu sebaliknya. Strategi dan instrumen pemerintah dalam penetapan sasaran pertumbuhan secara efektif pada setiap daerah salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, seperti : (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (5) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah; dan (6) Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah otonomi daerah ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, maupun alam pada setiap daerah, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pada setiap daerah, Sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.

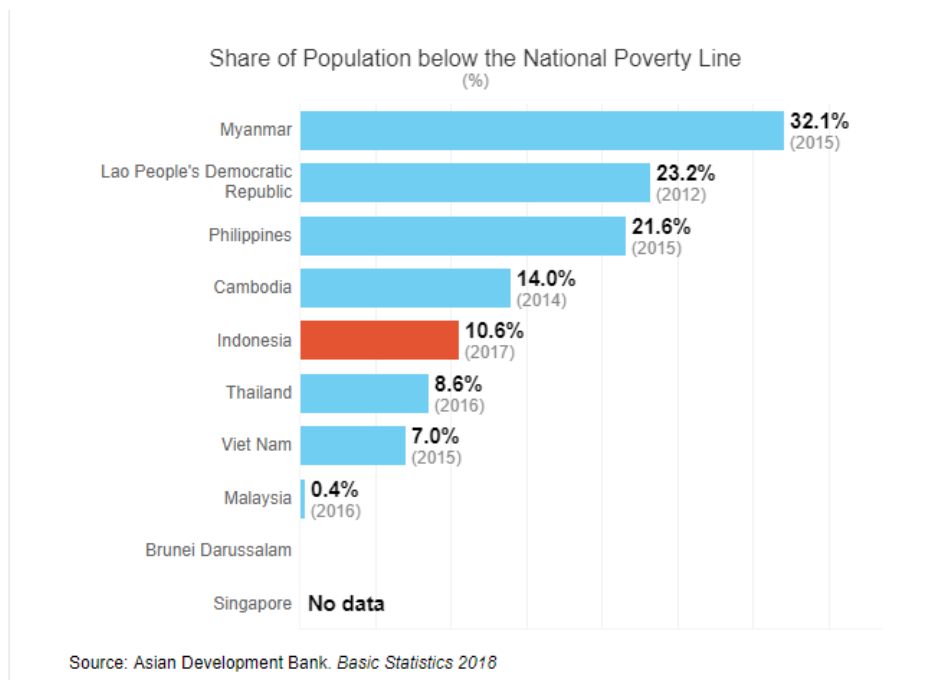
Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang sudah ada sejak lama. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Dalam Garis Kemiskinan Nasional (GKN), BPS menetapkan Rp 401.220 pendapatan per kapita per bulan. Tetapi GKN di setiap daerah berbeda beda, misalnya pada tahun 2018 di DKI Jakarta Rp 593.108 sementara di Nusa Tenggara Timur lebih rendah yaitu Rp 354.898. Kepala BPS Suharyanto menegaskan dalam (Kumparan.com), bahwa penghitungan tersebut berdasarkan per kapita, jika dalam keluarga rata – rata memiliki 2 hingga 3 anak maka Garis Kemiskinan Nasional sebesar 1,84 juta per rumah tangga per bulan. Kepala BPS mencontohkan, DKI jakarta garis kemiskinannya mencapai Rp 593.108 per kapita per bulan, maka garis keminann per rumah tangga per bulan mencapai Rp 3,1 juta. Sedangkan di Provinsi lain seperti NTT, garis kemiskinannya Rp 354.898 per kapita per bulan atau sebesar 2,1 juta per rumah tangga per bulan. Jika berdasarkan survei yang dilakukan BPS maka standar tersebut lebih besar dari standar yang

digunakan Bank Dunia. Garis kemiskinan nasional sama dengan 2,5 dolar PPP (*Purchasing Power Parity*) sedangkan standar kemiskinan Bank Dunia sebesar 1,9 dolar PPP. Yang perlu diketahui menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro standar Bank Dunia tidak dikonversikan berdasarkan kurs mata uang tetapi kedalam PPP (*Purchasing Power Parity*) dimana itu menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama dengan harga satu dolar. Sebagai contohnya ia menjelaskan bahwa uang satu dolar dibawa ke Indonesia dapat membeli lebih banyak dibandingkan dibawa ke Amerika, begitu pula jika dibawa ke Afrika dan negara – negara lainnya. Berarti tergantung tingkat harga di masing – masing negara. GKN di setiap provinsi berbeda - beda karena dipengaruhi oleh harga komoditas pangan dan non pangan terhadap daya beli masyarakat masing – masing daerah. Dalam Kemiskinan di Indonesia untuk pertama kalinya memecahkan rekor dibawah 10 persen untuk pertama kalinya. BPS mempublikasikan pada tahun 2018 tercatat turun menjadi 25,67 juta atau sama dengan 9,66%. Menurut Kepala BPS Suhariyanto dalam (cnnindonesia.com, 2019) dibandingkan dengan maret 2018 lalu sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen yang berarti ada penurunan penduduk miskin sebesar 280 ribu dari maret 2018. Berikut tingkat kemiskinan dalam 10 tahun terakhir



Gambar I. 1 Kemiskinan di Indonesia

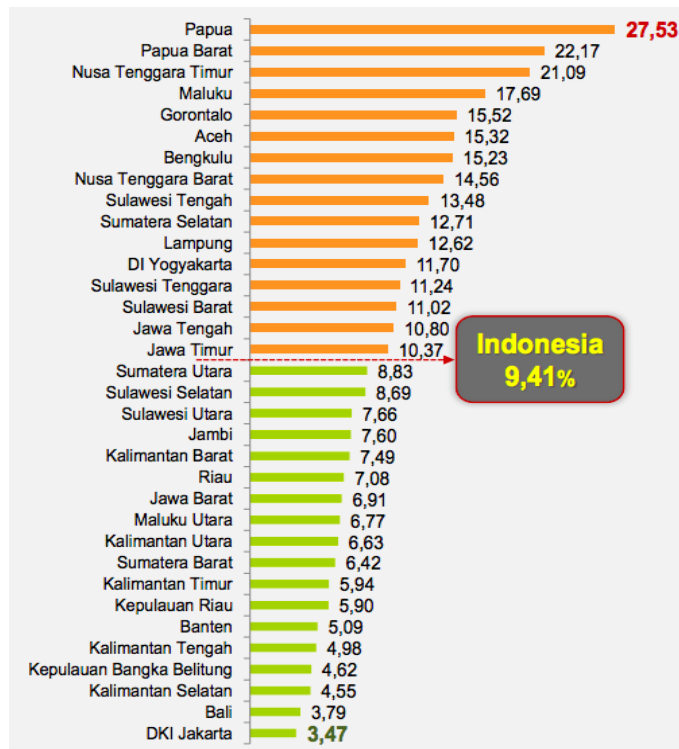
Di Asia Tenggara tingkat Kemiskinan di Indonesia juga tidak terlalu bagus. Pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi keempat (Singapura & Brunei Darussalam tidak dirilis). Berikut data kemiskinan di Asia Tenggara



Gambar I. 2 Kemiskinan di ASEAN

Berdasarkan tabel diatas Indonesia menempati peringkat keempat tingkat kemiskinan terendah. Peringkat tersebut bisa naik ke posisi 6 apabila Singapura dan Brunei Darussalam merilis data kemiskinannya. Jika melihat kedua negara maju tersebut, jelas Indonesia kemungkinan besar masih banyak presentase penduduk miskinnya daripada kedua negara tersebut. Faktor – faktor seperti penduduk yang terlalu banyak, negara kepulauan yang sulit dijangkau, pembangunan yang tidak merata dll menjadikan kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi di ASEAN

Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengatakan faktor kemiskinan di Indonesia sulit diatasi karena kebijakan di daerah – daerah cenderung mengikuti kebijakan di pusat. Pemerintah pusat harus mengatasi masalah kemiskinan dalam skala mikro sedangkan kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam skala makro. Hasilnya pemerintah pusat hanya mengurangi kemiskinan tetapi tidak mengentaskan kemiskinan hingga ke akar – akarnya. Dalam pemberian bantuan ditemukan kekeliruan, bantuan tersebut untuk per Kepala Keluarga bukan per Rumah Tangga. Padahal dalam satu rumah tangga bisa ada beberapa kepala keluarga. Dampak dari bantuan tersebut Rumah Tangga Masyarakat (RTM) cenderung meminta, sehingga tidak ada pemberdayaan untuk dirinya. Hal inilah yang sangat sulit diatasi. Berikut adalah gambar kemiskinan di Indonesia berdasarkan provinsi



Gambar I. 3 Kemiskinan di Provinsi Indonesia

Kemiskinan di Indonesia terbanyak di Pulau Jawa sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia bagian timur. Pada 2018, kemiskinan tertinggi di Provinsi Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%), Nusa Tenggara Timur (21,09%), Maluku (17,69%), Gorontalo (15,52%) dan Nusa Tenggara Barat (14,56%). Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial yang tinggi. Tidak hanya antarwilayah tetapi kawasan perkotaan dan pedesaan mengalami ketimpangan juga. Keduanya memiliki pelayanan dasar yang tidak merata. Padahal hal tersebut sangat penting untuk produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Masalah ini diprediksi akan semakin lebar di masa mendatang sehingga ketimpangan wilayah lebih besar.

Untuk mengatasi masalah tersebut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mempunyai strategi untuk mengatasinya dengan mengedepankan pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu, yaitu pertama, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan. Kedua, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan pedesaan, dan kota-kota sedang. Ketiga, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia. Program – program kemiskinan ini harus sejalan dengan program pemerintah seperti peningkatan APBD, proyek strategis nasional dan nilai investasi

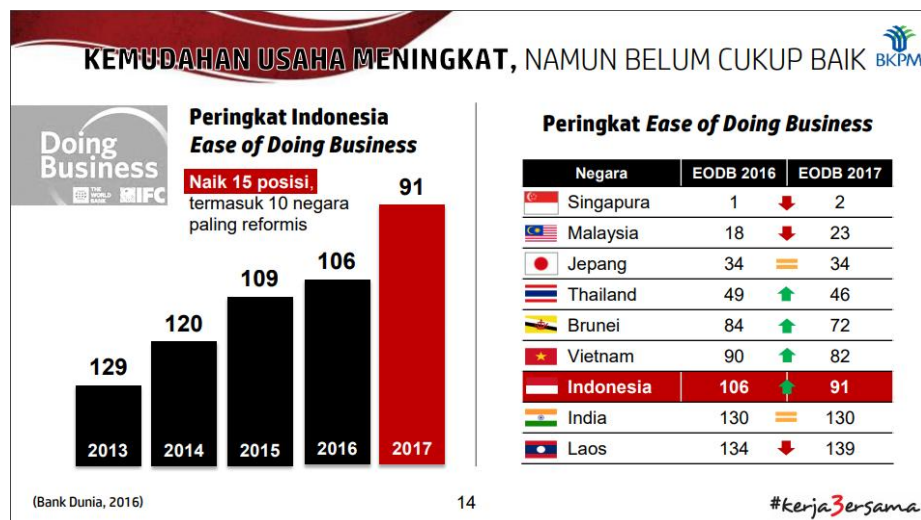
Investasi adalah kunci penentu laju Pertumbuhan Ekonomi dan pertumbuhan Ekonomi yang baik dapat mengurangi Kemiskinan. Investasi dapat mendorong kenaikan output secara signifikan, selain itu juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmum & Yasin, 2003).

Di Indonesia pada tahun 2018 investasi yang masuk tidak mencapai target. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang selalu mencapai target. Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan realisasi investasi selama 2018 sebesar Rp 721,3 triliun atau meningkat sebesar 4,1 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Target investasi yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 765 triliun yang berarti tahun 2018 hanya memenuhi sebesar 94,3% dari target yang di rencanakan. Menurut Kepala BPKM, Thomas Lembong yang dilansir (Liputan6.com) realisasi 2018 mengalami keterhambatan dikarenakan kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu yang berimbang pada investasi di tahun ini, disamping adanya hambatan dari faktor eksternal.

Jika dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya Indonesia belum mampu untuk menarik investasi asing ke dalam negeri. Hal ini terbukti ketika pertumbuhan Investasi RI yang kalah dengan Negara ASEAN. Menurut Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilansir (tirto.id) Indonesia tertinggal dengan negara tetangga seperti, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Ini merupakan masalah serius karena kita tidak bisa tertinggal dengan negara tetangga tersebut. Sistem perizinan usaha menjadi alasan investor asing lebih memilih tanam modal di negara lain dibandingkan dengan Indonesia. Jokowi juga mengatakan padahal menurut survei United Nation Conference on Trade and Developmeny Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara yang paling menarik untuk Investasi. Hal inilah yang membuat kejanggalan yang berarti sebenarnya banyak investor yang ingin berinvestasi di banyak bidang tetapi realisasinya hanya sedikit dikarenakan terlalu sulit untuk mnedapatkan

izin investasi. Berdasarkan pernyataan Jokowi yang mengatakan perizinan usaha di Indonesia sulit dapat dilihat dari Ease of Doing Business, Indonesia kalah bersaing dengan negara ASEAN yang disebutkan oleh Jokowi.



Sumber: Badan Koordinir Penanaman Modal

Gambar I. 4 EASE OF DOING BUSINESS

Pertumbuhan investasi asing Indonesia pun, tertinggal dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam, meskipun dari segi nilai cukup baik. Investasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Investasi di Indonesia favorit investor untuk menanamkan modalnya disana. Ketersediaan fasilitas infrastruktur yang lengkap, demografi penduduk yang besar, pekerja dengan upah yang cukup murah. Menjadikan Indonesia menjadi favorit para investor asing untuk menanamkan modal. Kestabilan negara juga merupakan faktor penting untuk menanamkan modal asing di Indonesia. Di tengah pertukaran uang yang sedang bergejolak, Indonesia termasuk stabil dalam menjaga mata uang. Meskipun para investor lebih

menahan uangnya karena pengaruh The Fed, masuknya investasi asing masih cukup baik di negara ASEAN lainnya

Demi terus mengundang investasi yang masuk, pemerintah harus terus menciptakan iklim investasi yang baik. Iklim investasi yang baik akan mampu menarik para investor untuk mau berinvestasi di Indonesia. Perbaikan iklim investasi dapat dilakukan diantaranya: ketersediaan input yang berkualitas yang mampu menunjang industri yang akan ditumbuhkan oleh investor, memperbaiki dan menyediakan infratraktur yang lengkap dan memnunjuk bagi pengusaha, adanya penerapan pajak yang sesuai yaitu tingkat pajak yang tidak memberatkan pihak investor, adanya *high return expectation* yang mampu diberikan, manajemen dan pelayanan birokrasi yang tidak menghambat investor dan cepat, serta terciptanya stabilitas ekonomi, politik dan keamanan di Indonesia.

Investasi terbukti berkontribusi besar pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, secara rata – rata faktor kapital cukup berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun faktor labor atau tenaga kerja lebih besar peranannya. Disisi sektoral, peran kapital pada sektor jasa dan industri lebih tinggi daripada sektor lainnya. Dilihat dari tambahan output secara sektoral, sektor – sektor yang mampu menambah output terbesar bagi perekonomian dari setiap tambahan investasi adalah sektor listrik, gas dan air; sektor bangunan dan industri pengolahan. Terakhir yang memiliki tingkat penyerapan tinggi dari setiap tambahan investasi

adalah pertanian, kehutanan dan peternakan, rumah makan, perdagangan, hotel dan jasa

Berdasarkan penjelasan diatas dalam mendorong perekonomian Indonesia pemerintah dapat mengarahkan investasi pada sektor yang memiliki multiplier tinggi agar pertumbuhan outputnya lebih tinggi, sehingga secara agregrat dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu dalam penyerapan tenaga kerja dan bisa mengurangi kemiskinan, investasi diarahkan pada sektor yang memiliki multiplier investasi dan tenaga kerja seperti: sektor bangunan, industri tekstil, kayu dan pengangkutan, restoran dll. Namun pemerintah juga harus tetap memperhatikan sektor yang memiliki multiplier rendah agar sektor tersebut bisa tetap bertahan dan bertumbuh secara merata.

Tabel I. 1 Data perkembangan Investasi Asing di Indonesia 2013 – 2017
(miliar rupiah)

Tahun	Jumlah PMA
2013	28,617.50
2014	28,529.70
2015	29,275.90
2016	28,964.10
2017	32,239.80

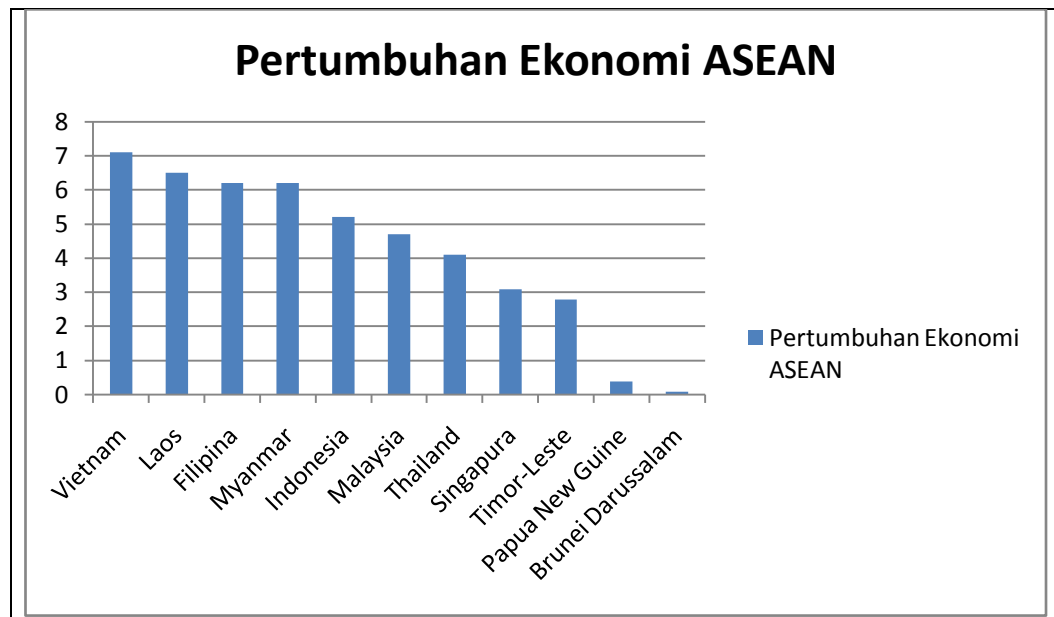
Sumber: Badan Koordinir Penanaman Modal

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat besarnya investasi luar negeri pada tahun 2013 – 2017. Perkembangan investasi luar negeri Indonesia cenderung bergerak naik meski ada beberapa tahun menurun tetapi masih dalam keadaan baik. Meskipun di tengah guncangan ekonomi global, Investasi di Indonesia

masih dalam jumlah yang besar. Hal ini yang harus dibanggakan melihat jumlahnya setiap tahun yang besar. Investasi ini yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kontribusi Penanaman Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sangat vital.

Pertumbuhan ekonomi menurut teori ekonomi mempengaruhi produktivitas kerja dan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Menurut (Kraay, 2006) secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat pertama untuk pengentasan kemiskinan dan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah *pro-poor*. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia setiap tahunnya masih dalam keadaan baik. Indonesia setiap tahunnya memiliki pertumbuhan ekonomi diatas 5%. Meski masih dalam keadaan baik tetapi jika dibandingkan negara lainnya Indonesia masih dibawah Vietnam, Malaysia bahkan Kamboja. Berikut tabel laju pertumbuhan ekonomi di negara – negara ASEAN.

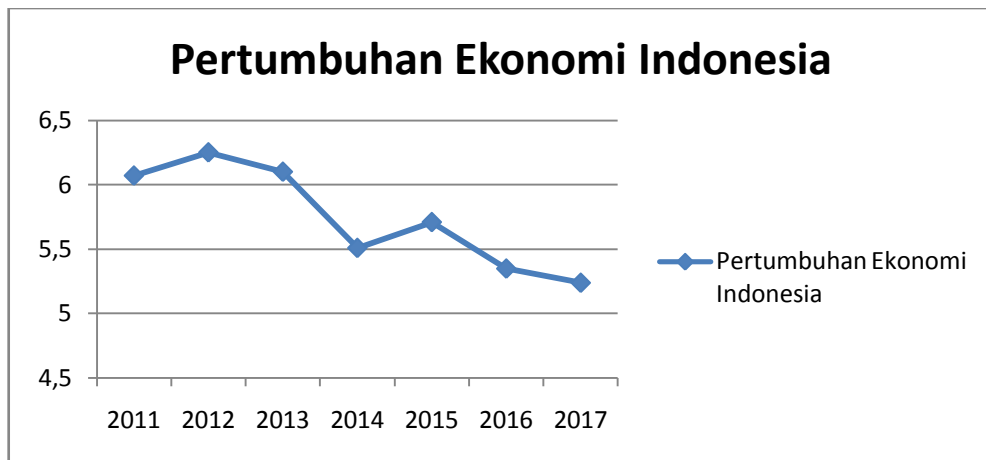
Tabel I. 2 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN 2017



Sumber: Asian Development bank

Berdasarkan tabel diatas meski negara maju seperti Brunei Darussalam dan Singapura di peringkat bawah tetapi itu adalah hal yang wajar bagi sebuah negara maju. Apakah begitu berarti Indonesia lebih baik dibanding Malaysia? Sebagai negara “masih” berkembang tidak lebih baik daripada Malaysia karena, sesama negara berkembang seharusnya pertumbuhan Indonesia diatas 6%. Jika melihat dari kondisi ekonomi Malaysia yang sedikit lebih maju dibanding Indonesia, seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa diatas Malaysia, jika tidak ingin tertinggal dari negara tetangga. Pada tahun 2017 memang sedang memasuki tahun politik dimana sedikit ada gejolak didalam negara, ini bisa menyebabkan kondisi ekonomi sedikit melambat. Dimana kegiatan pasar, para investor dan pembangunan sedikit mengalami kelesuhan, itu juga dari faktor eksternal seperti perang dagang yang terjadi.

Tabel I. 3 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2011 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas cenderung mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dalam keadaan “baik” karena selalu berada di 5%.

Jika melihat PDB menurut lapangan usaha di BPS. Terjadi ketidakmerataan pertumbuhan di beberapa sektor. Seperti sektor Penggalian dan Pertambangan mengalami minus pertumbuhan. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang bekerja di sektor tersebut kemungkinan ia bisa mendapatkan penghasilan yang rendah bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena sektor tersebut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga minus. Jika melihat Indonesia sebagai negara agraris, pemerintah dapat menginvestasikan ke sektor tersebut. Investasi dalam bentuk teknologi, pelatihan terhadap para petani, koperasi murah untuk kebutuhan para petani dan lain lain hal ini perlu dilakukan demi menunjang hasil output yang maksimal

Dalam penelitian Rizwan Akhtar, Hongman Liu dan Amjad Ali (2017), sektor pertanian turut berkontribusi terhadap PDB di negara agraris seperti Pakistan walau kontribusinya tidak sebesar sektor industri tetapi dalam penelitian tersebut peneliti berharap pemerintah harus fokus juga terhadap pertanian untuk meningkatkan produktivitas dengan mempermudah modal penyediaan yang mempercepat proses transformasi

Maka dari itu penulis akan mengambil judul **“Pengaruh Investasi Asing Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia”** karena masih terdapatnya penduduk miskin di Indonesia yang selalu menjadi masalah setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya kemiskinan di Indonesia cenderung masih tinggi

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh investasi asing langsung terhadap Kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh investasi asing langsung dan pertumbuhan ekonomi secara bersama - sama terhadap kemiskinan di Indonesia?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan koleksi pustaka di Universitas Negeri Jakarta, serta mampu memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi bagi peneliti lain mengenai pengaruh investasi asing langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan mengenai pentingnya melakukan pengaruh investasi asing langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk terus meningkatkan investasi asing langsung di Indonesia untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi serta mengurangi kemiskinan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang:

1. Pengaruh Investasi Asing Langsung terhadap Kemiskinan di Indonesia
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Pengaruh Investasi Asing Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.